



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 52 TAHUN 2016**

TENTANG

**TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GARUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2vc 016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GARUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsure pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi kesekretariatan, penataan ruang, bina program, sumber daya air, bina marga, bangunan, infrastruktur permukiman dan unit pelaksana teknis serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
 - b. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi kesekretariatan, penataan ruang, bina program, sumber daya air, bina marga, bangunan, infrastruktur permukiman dan unit pelaksana teknis serta kelompok jabatan fungsional;
 - c. penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Dinas;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
 - e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Dinas.
- (3) Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas yang meliputi kesekretariatan, penataan ruang, serta bantuan teknik, bina program, sumber daya air, bina marga, bangunan, infrastruktur permukiman dan unit pelaksana teknis serta kelompok jabatan fungsional berdasarkan visi dan misi serta tugas dan fungsi Dinas;
 - b. menyelenggarakan perumusan dan penetapan sasaran rencana kerja yang meliputi kesekretariatan, penataan ruang, bina program, sumber daya air, bina marga, bangunan, infrastruktur permukiman dan unit pelaksana teknis serta kelompok jabatan fungsional berdasarkan kebijakan umum Dinas dan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), , Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Dinas serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
 - d. penyelenggaraan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang penataan ruang, bidang bina program, sumber daya air, bina marga, bangunan, infrastruktur permukiman dan unit pelaksana teknis berdasarkan visi dan misi serta tugas dan fungsi Dinas;
 - e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum Perjanjian kinerja Perjanjian kinerjadan penataan ruang di daerah;

- f. menyelenggarakan pembentukan dan pengembangan kelembagaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di kabupaten berdasarkan kebijakan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - g. menyelenggarakan kebijakan Pemerintah dan Provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - h. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas Dinas;
 - i. menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan/pembangunan bidang penataan ruang, bidang bina program, sumber daya air, bina marga, bangunan, infrastruktur permukiman dan unit pelaksana teknis sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
 - j. menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang dan unit pelaksana teknis;
 - k. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di daerah;
 - l. menyelenggarakan pembinaan tenaga fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - m. mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
 - n. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 - o. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
 - p. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
 - q. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier staf;
 - r. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - s. mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala unit pelaksana teknis melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan rekomendasi camat;
 - t. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - u. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
 - v. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - w. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas dinas; dan
 - x. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Kepala Dinas, membawahkan:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Penataan Ruang;
 - c. Bidang Bina Program;
 - d. Bidang Sumber Daya Air;
 - e. Bidang Bina Marga;

- f. Bidang Bangunan;
- g. Bidang Infrastruktur Permukiman;
- h. Unit Pelaksana Teknis; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan keuangan, barang milik daerah serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.
- (3) Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan;
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan sebagai pedoman kerja;
 - c. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
 - d. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi data rencana anggaran dan belanja kegiatan Dinas yang bersumber dari bidang;
 - e. menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, serta keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- g. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai konsep tata naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan Dina Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana kerja bidang penataan ruang, bidang bina program, sumber daya air, bina marga, bangunan, dan infrastruktur permukiman serta unit pelaksana teknis;
- i. menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- j. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya;
- k. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
- l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- m. mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup sekretariat sesuai bidang tugasnya;
- n. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf;
- o. mengkoordinasikan tugas staf di lingkup sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- p. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup sekretariat agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
- r. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya;
- s. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- t. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
- u. mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di lingkungan dinas tata ruang dan permukiman agar terwujud tertib administrasi;
- v. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- w. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya serta dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum;
- x. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan dinas, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi Dinas;
- y. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- z. mengkoordinasikan laporan kegiatan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada pimpinan;
- aa. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan program kegiatan dinas tata ruang dan permukiman sesuai dengan ketentuan;
- bb. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

- cc. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- (4) Sekretaris, membawahkan:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 - c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan keprotokolan, rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Uraian tugas kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan dalam lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
 - c. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan penyediaan peralatan kerja;
 - d. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas Dinas.
 - e. melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Dinas;
 - f. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan informasi dinas;
 - g. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan, inventarisasi serta pelaporan dan usulan penghapusan barang milik daerah/aset daerah yang digunakan oleh Dinas;
 - h. menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan dinas;
 - i. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
 - j. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - k. menyiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam lingkup dinas;
 - l. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;

- m. memberikan pelayanan/fasilitas kepada pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan izin/tugas belajar;
- n. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- o. menyiapkan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- p. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan dinas serta melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- s. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para staf;
- t. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- u. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- v. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian umum dan Kepegawaian untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
- w. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
- x. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- y. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- z. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- aa. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- bb. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik daerah/Aset.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah/Aset Dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah/Aset Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan dan Aset.

- (3) Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja subbagian keuangan dan aset berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran;
 - c. melaksanakan teknis penatausahaan keuangan dan barang milik daerah/Aset;
 - d. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya;
 - e. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset dinas;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan;
 - h. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;
 - i. melaksanakan akuntansi keuangan;
 - j. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
 - k. melaksanakan administrasi penysetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - m. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
 - n. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;
 - o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - p. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
 - q. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - r. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - s. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
 - t. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - u. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 - v. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - w. memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - x. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- b. pelaksanaan pelayanan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
 - c. mengkaji bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja masing-masing bidang pada Dinas;
 - e. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan program dan kegiatan masing-masing bidang untuk bahan penyusunan prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan;
 - f. melaksanakan fasilitasi pengolahan data, pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan;
 - g. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas sebagai bahan penyusunan rencana kerja dinas;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian kinerja dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja lainnya;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Dinas;
 - j. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan triwulan, semesteran, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya yang telah ditentukan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
 - m. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - n. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - o. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
 - p. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - q. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 - r. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

- s. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- t. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Penataan Ruang

Pasal 8

- (1) Bidang Penataan Ruang, dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Penataan Ruang, meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penataan Ruang, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis operasional Bidang Penataan Ruang, meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 - b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Penataan Ruang, meliputi perencanaan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Penataan Ruang.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Penataan Ruang adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas Bidang Penataan Ruang;
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Penataan Ruang berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis lingkungan dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan penyusunan rencana rinci tata ruang;
 - d. menyelenggarakan sinkronisasi perencanaan ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi dan sosialisasi rencana rinci tata ruang;
 - f. menyelenggarakan penyusunan masterplan sektoral dan kajian yang merupakan penjabaran dari rencana rinci tata ruang;
 - g. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perencanaan tata ruang kawasan;
 - h. menyelenggarakan pelayanan data dan informasi arahan perencanaan pemanfaatan ruang bagi rencana investasi pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;
 - i. menyelenggarakan fasilitasi, kajian dan/atau saran teknis proses pelayanan perizinan untuk penerbitan rekomendasi teknis dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - j. menyelenggarakan fasilitasi penerbitan/pengesahan rencana tapak (*site plan*);
 - k. menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pengendalian pemanfaatan ruang;

- l. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang serta menara telekomunikasi;
 - m. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Penataan Ruang;
 - n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - o. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - p. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas;
 - q. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - r. menyelia kegiatan staf dalam lingkup Bidang Penataan Ruang untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - s. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - t. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
 - u. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - v. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup penataan ruang secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
 - w. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - x. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Kepala Bidang Penataan Ruang membawahkan:
- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 9

- (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam lingkup Seksi Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Perencanaan Tata Ruang.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi perencanaan tata ruang;

- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi perencanaan tata ruang sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Perencanaan Tata Ruang berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana rinci tata ruang;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan sinkronisasi perencanaan ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi rencana rinci tata ruang;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan *master plan* sektoral dan kajian yang merupakan penjabaran dari rencana rinci tata ruang;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perencanaan tata ruang kawasan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan data dan informasi arahan perencanaan pemanfaatan ruang bagi rencana investasi pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- l. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- n. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- o. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- q. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- r. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- s. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- t. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam lingkup Seksi Pemanfaatan Ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemanfaatan Ruang;

- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemanfaatan Ruang.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang adalah:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Pemanfaatan Ruang sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemanfaatan Ruang berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, kajian dan/atau saran teknis proses pelayanan perizinan untuk penerbitan rekomendasi teknis dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penerbitan/pengesahan rencana tapak (*site plan*);
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - h. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - j. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - k. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - m. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 - n. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - o. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
 - p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Uraian Tugas Kepala Seksi Pengendalian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data basis Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
 - e. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - f. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup seksi pengendalian pemanfaatan ruang;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - i. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - j. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - k. memeriksa hasil kerja staf dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - l. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - n. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 - o. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup pemanfaatan ruang secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - p. memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
 - q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Bina Program

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Program dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Bina Program yang meliputi penyusunan program, penelitian dan pengembangan, serta pembinaan jasa konstruksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bina Program mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Bina Program, meliputi penyusunan program, penelitian dan pengembangan, serta pembinaan jasa konstruksi;
 - b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Bina Program, meliputi penyusunan program, penelitian dan pengembangan, serta pembinaan jasa konstruksi;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Bina Program.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Bina Program adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas Bidang Bina Program;
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Bina Program berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis lingkungan dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan rekapitulasi usulan dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Provinsi serta nasional;
 - d. menyelenggarakan usulan, program serta kegiatan dengan bidang dilingkungan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. menyelenggarakan pemantauan serta evaluasi terhadap rencana program dan kegiatan tahunan dan lima tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. menyelenggarakan entri data program dan kegiatan lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - g. menyelenggarakan survey untuk pendukung data bahan perencanaan teknis;
 - h. menyelenggarakan fasilitasi perencanaan dan kajian teknis;
 - i. menyelenggarakan penyusunan harga dasar satuan bahan, upah dan satuan pekerjaan;
 - j. menyelenggarakan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan penyelenggaraan kerjasama/kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan unsur pemerintah lainnya dalam survei, perencanaan teknis, penelitian dan pengembangan teknologi;
 - k. menyelenggarakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria operasional pelaksanaan pekerjaan;
 - l. menyelenggarakan fasilitasi teknis kepada unsur masyarakat dan lembaga swasta/pemerintah terhadap detail perencanaan;
 - m. menyelenggarakan fasilitasi bimbingan teknis tenaga terampil konstruksi;
 - n. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;

- o. menyelenggarakan fasilitas kajian dan/atau saran teknis proses penerbitan rekomendasi perizinan usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
 - p. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 - q. menyelenggarakan fasilitasi bimbingan teknis pelaksanaan pengaturan jasa konstruksi;
 - r. menyelenggarakan penyusunan serta merencanakan kegiatan pengaturan jasa Konstruksi;
 - s. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan pengendalian mutu dan pemberdayaan jasa Konstruksi;
 - t. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Bina Program;
 - u. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - v. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - w. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas;
 - x. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - y. menyelia kegiatan staf dalam lingkup Bidang Bina Program untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - z. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - aa. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
 - bb. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - cc. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bina Program dan energi secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
 - dd. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - ee. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Kepala Bidang Bina Program membawahkan:
- a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
 - c. Seksi Bina Jasa Konstruksi.

Pasal 13

- (1) Seksi Penyusunan Program dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Penyusunan Program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyusunan Program mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Penyusunan Program;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penyusunan Program;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Penyusunan Program;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Penyusunan Program.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Penyusunan Program adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Penyusunan Program;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Penyusunan Program sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan rencana kerja Seksi Penyusunan Program berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan dan rekapitulasi usulan dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota Dan Provinsi serta Nasional;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan usulan, program serta kegiatan dengan bidang dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi terhadap rencana program dan kegiatan tahunan dan lima tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan entri data program dan kegiatan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi Penyusunan Program;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - j. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - k. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - l. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - m. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - n. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - o. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 - p. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - q. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
 - r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 14

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam lingkup Seksi Penelitian dan Pengembangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Penelitian dan Pengembangan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Penelitian dan Pengembangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja Seksi Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Penelitian dan Pengembangan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Penelitian dan Pengembangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan survai untuk pendukung data bahan perencanaan teknis;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perencanaan dan kajian teknis;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan harga dasar satuan bahan, upah dan satuan pekerjaan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan penyelenggaraan kerjasama/kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan unsur pemerintah lainnya dalam survei, perencanaan teknis, penelitian dan pengembangan teknologi;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria operasional pelaksanaan pekerjaan;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi teknis kepada unsur masyarakat dan lembaga swasta/pemerintah terhadap detail perencanaan;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi Penelitian dan Pengembangan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - l. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - m. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - n. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - o. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - p. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - q. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 - r. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

- s. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- t. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Bina Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Bina Jasa Konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Bina Jasa Konstruksi;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Bina Jasa Konstruksi;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Bina Jasa Konstruksi;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Bina Jasa Konstruksi.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Bina Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Bina Jasa Konstruksi;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Bina Jasa Konstruksi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Bina Jasa Konstruksi berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis tenaga terampil konstruksi;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan sistem informasi jasa konstruksi;
 - f. menyiapkan bahan fasilitas kajian dan/atau saran teknis proses penerbitan rekomendasi perizinan usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis pelaksanaan pengaturan jasa konstruksi;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan serta merencanakan kegiatan pengaturan jasa Konstruksi;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring pelaksanaan pengendalian mutu dan pemberdayaan jasa Konstruksi;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi Bina Jasa Konstruksi;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - m. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - n. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - o. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;

- p. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- r. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- t. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- u. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Sumber Daya Air, meliputi irigasi, konservasi dan pengembangan sumber daya air, dan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya air.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis operasional kerja Bidang Sumber Daya Air, meliputi irigasi, konservasi dan pengembangan sumber daya air, dan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya air;
 - b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Sumber Daya Air, meliputi irigasi, konservasi dan pengembangan sumber daya air, dan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya air;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kerja Bidang Sumber Daya Air.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis Dinas Bidang Sumber Daya Air;
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Sumber Daya Air berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas serta kondisi dinamis lingkungan dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
 - d. menyelenggarakan penyusunan rencana tata tanam detail dan rencana tata tanam global untuk bahan masukan bagi komisi irigasi;
 - e. menyelenggarakan kerjasama dengan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) di tingkat jaringan irigasi secara partisipatif;

- f. menyelenggarakan fasilitas kajian dan/atau saran teknis proses penerbitan rekomendasi perizinan pemakaian saluran dan lahan irigasi;
- g. menyelenggarakan fasilitasi penyusunan angka kebutuhan nyata irigasi bagi Komisi Irigasi Tingkat Kabupaten;
- h. menyelenggarakan penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi;
- i. menyelenggarakan survei investigasi desain partisipatif di tingkat jaringan irigasi;
- j. menyelenggarakan peningkatan dan pembangunan irigasi;
- k. menyelenggarakan operasi, pemeliharaan dan pemanfaatan irigasi;
- l. menyelenggarakan konservasi kawasan dan lahan sumber daya air pada wilayah sungai;
- m. menyelenggarakan survei investigasi dan desain pada kawasan dan lahan konservasi sumber daya air;
- n. menyelenggarakan pembangunan infrastruktur pada kawasan dan lahan konservasi sumber daya air;
- o. menyelenggarakan perencanaan teknis dan rehabilitasi sub Daerah Aliran Sungai (DAS);
- p. menyelenggarakan pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air;
- q. menyelenggarakan fasilitas kajian dan/atau saran teknis proses penerbitan rekomendasi perizinan berdasarkan pemanfaatan sempadan sungai dan peil banjir;
- r. menyelenggarakan pengendalian daya rusak air;
- s. menyelenggarakan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai;
- t. menyelenggarakan pengendalian pembangunan saluran pembuang pada kawasan dan lahan sumber daya air;
- u. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Sumber Daya Air;
- v. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- w. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- x. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas;
- y. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- z. menyelia kegiatan staf dalam lingkup Bidang Perumahan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- aa. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- bb. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
- cc. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- dd. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup perumahan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
- ee. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- ff. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (4) Kepala Bidang Sumber Daya Air membawahkan:
- a. Seksi Irigasi;
 - b. Seksi Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air; dan
 - c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Air.

Pasal 17

- (1) Seksi Irigasi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Irigasi mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Irigasi;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Irigasi;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Irigasi;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Irigasi.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Irigasi adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Irigasi;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Irigasi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Irigasi berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana tata tanam detail dan rencana tata tanam global untuk bahan masukan bagi komisi irigasi;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) di tingkat jaringan irigasi secara partisipatif;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitas kajian dan/atau saran teknis proses penerbitan rekomendasi perizinan pemakaian saluran dan lahan irigasi;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan angka kebutuhan nyata irigasi bagi Komisi Irigasi Tingkat Kabupaten;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan survai investigasi desain partisipatif di tingkat jaringan irigasi;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan dan pembangunan irigasi;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan operasi, pemeliharaan dan pemanfaatan irigasi;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi Irigasi;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - o. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - p. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - q. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;

- r. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- s. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- t. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- u. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- v. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- w. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air dipimpin oleh Seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan konservasi kawasan dan lahan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan survai investigasi dan desain pada kawasan dan lahan konservasi sumber daya air;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur pada kawasan dan lahan konservasi sumber daya air;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan teknis dan rehabilitasi sub Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya AIR;

- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- j. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- l. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- m. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- o. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- q. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Air dipimpin oleh Seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Air.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Air adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Air sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Air berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air;

- e. menyiapkan bahan fasilitas kajian dan/atau saran teknis proses penerbitan rekomendasi perizinan berdasarkan pemanfaatan sempadan sungai dan peil banjir;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian daya rusak air;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan serta mengendalikan pembangunan saluran pembuang pada kawasan dan lahan sumber daya air;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- k. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- m. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- n. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- p. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- r. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- s. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Bina Marga

Pasal 20

- (1) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Bina Marga, meliputi pembangunan jalan, pemeliharaan jalan, dan pemanfaatan jalan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis operasional Bidang Bina Marga, meliputi pembangunan jalan, pemeliharaan jalan, dan pemanfaatan jalan;
 - b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Bina Marga, meliputi pembangunan jalan, pemeliharaan jalan, dan pemanfaatan jalan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Bina Marga.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Bina Marga adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis Dinas Bidang Bina Marga;
- b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Bina Marga berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas serta kondisi dinamis lingkungan dan masyarakat;
- c. menyelenggarakan penyusunan rencana teknis pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
- d. menyelenggarakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan;
- e. menyelenggarakan pengadaan lahan untuk kepentingan pembangunan jalan dan jembatan;
- f. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan serta pelengkapya;
- g. menyelenggarakan pembinaan jalan desa serta pelengkapya berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan;
- h. menyelenggarakan fasilitasi teknis dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa oleh masyarakat, swasta, pemerintah dan instansi lainnya;
- i. menyelenggarakan inventarisasi data kondisi jalan dan jembatan;
- j. menyelenggarakan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan serta pelengkapya berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan;
- k. menyelenggarakan penanganan darurat kerusakan jalan dan jembatan Kabupaten/Desa akibat bencana dan/atau karena sebab lainnya;
- l. menyelenggarakan koordinasi untuk relokasi jalan dan jembatan Kabupaten/Desa yang diakibatkan bencana dan/atau karena sebab lainnya;
- m. menyelenggarakan pengawasan serta pengendalian pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan kabupaten dan pelengkapya serta penanganan darurat kerusakan jalan kabupaten akibat bencana dan/atau karena sebab lainnya;
- n. menyelenggarakan pengadaan, penyimpanan dan distribusi bahan/material pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- o. menyelenggarakan pemeliharaan rutin/pengelolaan serta penyelenggaraan sistem manajemen jalan dan jembatan;
- p. menyelenggarakan penyusunan bahan pengaturan teknis pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan terhadap aktivitas masyarakat di luar kepentingan lalu lintas dan melaksanakan penyusunan kajian teknis untuk bahan pertimbangan perijinan;
- q. menyelenggarakan pengaturan teknis, pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan berdasarkan standar yang telah ditetapkan;
- r. menyelenggarakan fasilitasi kajian dan/atau saran teknis proses pelayanan perizinan penerbitan rekomendasi pemerintah daerah untuk perizinan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
- s. menyelenggarakan penyusunan bahan pengaturan teknis ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
- t. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Bina Marga;
- u. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- v. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;

- w. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas;
 - x. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - y. menyelia kegiatan staf dalam lingkup Bidang Bina Marga untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - z. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - aa. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
 - bb. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - cc. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bina Marga secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
 - dd. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - ee. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Kepala Bidang Bina Marga membawahkan:
- a. Seksi Pembangunan Jalan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan; dan
 - c. Seksi Pemanfaatan Jalan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembangunan Jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Jalan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan Jalan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan Jalan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pembangunan Jalan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembangunan Jalan.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pembangunan Jalan adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Pembangunan Jalan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pembangunan Jalan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana teknis pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan lahan untuk kepentingan pembangunan jalan dan jembatan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan serta pelengkap;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan jalan desa serta pelengkap berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi teknis dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa oleh masyarakat, swasta, pemerintah dan instansi lainnya;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi data kondisi jalan dan jembatan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pembangunan Jalan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
- m. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- o. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- p. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- r. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- t. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- u. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dipimpin oleh Seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemeliharaan Jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemeliharaan Jalan.

- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Pemeliharaan Jalan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pemeliharaan Jalan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan serta pelengkapannya berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penanganan darurat kerusakan jalan dan jembatan Kabupaten/Desa akibat bencana dan/atau karena sebab lainnya;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi untuk relokasi jalan dan jembatan Kabupaten/Desa yang diakibatkan bencana dan/atau karena sebab lainnya;
 - g. melaksanakan pengawasan serta pengendalian pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Kabupaten dan pelengkapannya serta penanganan darurat kerusakan jalan kabupaten akibat bencana dan/atau karena sebab lainnya;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan distribusi bahan/material pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan rutin/pengelolaan serta penyelenggaraan sistem manajemen jalan dan jembatan;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
 - l. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - m. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - n. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - o. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - p. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - q. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 - r. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - s. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
 - t. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pemanfaatan Jalan dipimpin oleh Seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemanfaatan Jalan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemanfaatan Jalan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemanfaatan Jalan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemanfaatan Jalan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemanfaatan Jalan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemanfaatan Jalan.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pemanfaatan Jalan adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemanfaatan Jalan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Pemanfaatan Jalan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemanfaatan Jalan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengaturan teknis pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan terhadap aktivitas masyarakat di luar kepentingan lalu lintas dan melaksanakan penyusunan kajian teknis untuk bahan pertimbangan perijinan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengaturan teknis, pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan berdasarkan standar yang telah ditetapkan;
 - f. menyiapkan bahan fasilitasi kajian dan/atau saran teknis proses pelayanan perizinan penerbitan rekomendasi Pemerintah Daerah untuk perizinan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan pengaturan teknis ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pemanfaatan Jalan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
 - j. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - k. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - l. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - m. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - n. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - o. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 - p. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - q. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
 - r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan**Bidang Bangunan****Pasal 24**

- (1) Bidang Bangunan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Bangunan, meliputi bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian bangunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bangunan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis operasional Bidang Bangunan, meliputi bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian bangunan;
 - b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Bangunan, meliputi bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian bangunan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Bangunan.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Bangunan adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dinas Bidang Bangunan;
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Bangunan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis lingkungan dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan perencanaan teknis bangunan gedung;
 - d. menyelenggarakan pelayanan data dan informasi bangunan gedung bagi rencana pembangunan pemerintah;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi, kajian dan/atau saran teknis untuk proses pelayanan perizinan dan untuk penerbitan rekomendasi teknis yang berhubungan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Perhitungan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - f. menyelenggarakan survei, pengukuran, penggambaran, perhitungan, pamarafan dan penandatanganan dokumen teknis pada pekerjaan penghapusan bangunan gedung rumah Negara/Pemerintah Kabupaten Garut,
 - g. menyelenggarakan analisa tingkat kerusakan bangunan gedung rumah Negara/Pemerintah Kabupaten Garut, analisa harga satuan pekerjaan, rincian bangunan gedung/rumah yang terkena rencana pembangunan
 - h. menyelenggarakan usulan pembangunan/rehabilitasi bangunan gedung Negara;
 - i. menyelenggarakan penyusunan rincian bangunan gedung dan bangunan yang terkena rencana pembangunan program Pemerintah;
 - j. menyelenggarakan penerbitan Surat Kepemilikan Laik Bangunan (SKLB);
 - k. menyelenggarakan penentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
 - l. menyelenggarakan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
 - m. menyelenggarakan perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan teknis, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, gedung, pengelolaan rumah negara, penataan bangunan dan lingkungan khusus;

- n. menyelenggarakan inventarisasi dan mengidentifikasi serta membuat dokumentasi teknis penataan bangunan dan lingkungan di daerah perkotaan, perdesaan maupun di dalam kawasan yang bersifat fungsional;
- o. menyelenggarakan analisis lingkup penataan bangunan yang meliputi menyusun rencana tata bangunan, memverifikasi dokumen teknis meliputi mengkaji kesesuaian luas bangunan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan arahan teknis dalam penataan ruang, sempadan bangunan, pendataan bangunan serta penataan bangunan Negara;
- p. menyelenggarakan perencanaan, pembinaan serta pengendalian penataan bangunan dan lingkungan;
- q. menyelenggarakan penyebarluasan informasi serta mengawasi pemantapan spesifikasi standar dan pedoman teknis dibidang penataan bangunan dan lingkungan, menjaga nilai arsitektur dan jatidiri kawasan;
- r. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan terhadap fungsi bangunan umum dan bangunan negara;
- s. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis kelayakan bangunan;
- t. menyelenggarakan pengawasan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- u. menyelenggarakan pengendalian tata letak bangunan, struktur dan teknik arsitektur bangunan;
- v. menyelenggarakan penyuluhan penyelenggaraan bangunan umum kepada masyarakat;
- w. menyelenggarakan fasilitasi serta koordinasi pemberian bantuan teknis penyelenggaraan peningkatan kualitas sarana prasarana;
- x. menyelenggarakan penelitian keberatan, perselisihan dan sengketa bangunan;
- y. menyelenggarakan pemeriksaan terhadap bangunan yang didirikan dan diduga tidak memiliki IMB serta bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan tanah dan bangunan;
- z. menyelenggarakan hasil pemeriksaan untuk memberikan rekomendasi bagi bangunan-bangunan yang akan ditertibkan;
- aa. menyelenggarakan pengelolaan data bangunan sesuai peruntukannya;
- bb. menyelenggarakan teguran/peringatan terhadap pelanggaran ketentuan secara tertulis atau lisan;
- cc. menyelenggarakan pengawasan terhadap penerapan peraturan tentang bangunan gedung;
- dd. menyelenggarakan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang tidak memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
- ee. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam Bidang Bangunan;
- ff. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- gg. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- hh. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas;
- ii. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- jj. menyelia kegiatan staf dalam lingkup Bidang Bangunan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- kk. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- ll. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;

- mm. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - nn. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Bangunan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
 - oo. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - pp. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Kepala Bidang Bangunan membawahkan:
- a. Seksi Bangunan Gedung;
 - b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan.

Pasal 25

- (1) Seksi Bangunan Gedung dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam lingkup Seksi Bangunan Gedung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bangunan Gedung mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Bangunan Gedung;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Bangunan Gedung;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Bangunan Gedung;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Bangunan Gedung.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Bangunan Gedung adalah:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Bangunan Gedung;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Bangunan Gedung sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Bangunan Gedung berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan teknis bangunan gedung;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan data dan informasi bangunan gedung bagi rencana pembangunan Pemerintah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, kajian dan/atau saran teknis untuk proses pelayanan perizinan dan untuk penerbitan rekomendasi teknis yang berhubungan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Perhitungan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan survai, pengukuran, penggambaran, perhitungan, pamarafan dan penandatanganan dokumen teknis pada pekerjaan penghapusan bangunan gedung rumah Negara/Pemerintah Kabupaten Garut;

- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa tingkat kerusakan bangunan gedung rumah Negara/Pemerintah Kabupaten Garut, analisa harga satuan pekerjaan, rincian bangunan gedung/rumah yang terkena rencana pembangunan
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan usulan pembangunan/rehabilitasi bangunan gedung negara;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rincian bangunan gedung dan bangunan yang terkena rencana pembangunan program Pemerintah;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi serta koordinasi pemberian bantuan teknis penyelenggaraan peningkatan kualitas sarana prasarana;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerbitan Surat Kepemilikan Laik Bangunan (SKLB);
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Bangunan Gedung;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- p. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- q. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- r. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- s. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- t. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- u. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- v. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- w. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- x. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam lingkup Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan teknis, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, gedung, pengelolaan rumah negara, penataan bangunan dan lingkungan khusus;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan mengidentifikasi serta membuat dokumentasi teknis penataan bangunan dan lingkungan di daerah perkotaan, perdesaan maupun di dalam kawasan yang bersifat fungsional;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis lingkup penataan bangunan yang meliputi menyusun rencana tata bangunan, memverifikasi dokumen teknis meliputi mengkaji kesesuaian luas bangunan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan arahan teknis dalam penataan ruang, sempadan bangunan, pendataan bangunan serta penataan bangunan negara;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan, pembinaan serta pengendalian penataan bangunan dan lingkungan;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyebarluasan informasi serta mengawasi pemantapan spesifikasi standar dan pedoman teknis di bidang penataan bangunan dan lingkungan, menjaga nilai arsitektur dan jati diri kawasan;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi serta koordinasi pemberian bantuan teknis penyelenggaraan peningkatan kualitas sarana prasarana;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - m. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - n. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - o. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - p. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - q. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - r. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 - s. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

- t. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- u. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam lingkup Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap fungsi bangunan umum dan bangunan negara;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis kelayakan bangunan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian tata letak bangunan, struktur dan teknik arsitektur bangunan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan penyelenggaraan bangunan umum kepada masyarakat;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian keberatan, perselisihan dan sengketa bangunan;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan terhadap bangunan yang didirikan dan diduga tidak memiliki IMB serta bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan tanah dan bangunan;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan hasil pemeriksaan untuk memberikan rekomendasi bagi bangunan-bangunan yang akan ditertibkan;

- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan data bangunan sesuai peruntukannya;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi serta koordinasi pemberian bantuan teknis penyelenggaraan peningkatan kualitas sarana prasarana;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan teguran/peringatan terhadap pelanggaran ketentuan secara tertulis atau lisan;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap penerapan peraturan tentang bangunan gedung;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang tidak memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- s. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- t. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- u. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- v. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- w. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- x. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- y. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- z. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- aa. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan

Bidang Infrastruktur Permukiman

Pasal 28

- (1) Bidang Infrastruktur Permukiman dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Infrastruktur Permukiman, meliputi sanitasi dan air limbah domestik, pengelolaan air bersih, dan drainase dan infrastruktur jalan lingkungan permukiman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis operasional Bidang Infrastruktur Permukiman, meliputi sanitasi dan air limbah domestik, pengelolaan air bersih, dan drainase dan infrastruktur jalan lingkungan permukiman;

- b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Infrastruktur Permukiman, meliputi sanitasi dan air limbah domestik, pengelolaan air bersih, dan drainase dan infrastruktur jalan lingkungan permukiman;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Infrastruktur Permukiman.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman adalah sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dinas Bidang Infrastruktur Permukiman;
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Infrastruktur Permukiman berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis lingkungan dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan penanganan sanitasi dan air limbah domestik berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);
 - d. menyelenggarakan survey untuk pendukung pembangunan, peningkatan atau perbaikan atau pemeliharaan atau pengembangan sistem pengelolaan sanitasi dan air limbah domestik di luar kawasan kumuh;
 - e. menyelenggarakan pembinaan teknis terhadap detail perencanaan pembangunan atau peningkatan atau perbaikan atau pemeliharaan atau pengembangan sistem pengelolaan Sanitasi dan Air Limbah Domestik di luar kawasan kumuh;
 - f. menyelenggarakan program pembangunan atau peningkatan atau perbaikan atau pemeliharaan atau pengembangan sistem pengelolaan sanitasi dan air limbah domestik di luar kawasan kumuh;
 - g. menyelenggarakan pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan pembangunan atau peningkatan atau perbaikan atau pemeliharaan atau pengembangan atau pengembangan sistem sanitasi dan air limbah domestik di luar kawasan kumuh;
 - h. menyelenggarakan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan penyelenggaraan kerjasama, kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan atau peningkatan atau perbaikan atau pemeliharaan atau pengembangan atau pengembangan sistem pengelolaan sanitasi dan air limbah domestik di luar kawasan kumuh;
 - i. menyelenggarakan pembangunan jaringan perpipaan air bersih, perlindungan mata air, sumur bor dan sumur gali berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);
 - j. menyelenggarakan survei untuk pendukung pembangunan, peningkatan, perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan sistem penyediaan penanganan air bersih di luar kawasan kumuh;
 - k. menyelenggarakan pembinaan teknis terhadap detail perencanaan pembangunan, peningkatan, perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan sistem penyediaan penanganan air bersih di luar kawasan kumuh;
 - l. menyelenggarakan program pembangunan, peningkatan, perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan sistem penyediaan penanganan air bersih di luar kawasan kumuh;
 - m. menyelenggarakan pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, peningkatan, perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan sistem penyediaan penanganan air bersih di luar kawasan kumuh;

- n. menyelenggarakan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan penyelenggaraan kerjasama, kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan, peningkatan, perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan sistem penyediaan Penanganan Air Bersih di luar kawasan kumuh;
 - o. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten serta penyelenggaraan infrastruktur jalan permukiman berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);
 - p. menyelenggarakan survey untuk pendukung pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dan penyelenggaraan infrastruktur jalan permukiman dan pelengkapannya di luar kawasan kumuh;
 - q. menyelenggarakan pembinaan teknis terhadap detail perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dan penyelenggaraan infrastruktur jalan permukiman dan pelengkapannya di luar kawasan kumuh;
 - r. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dan penyelenggaraan infrastruktur jalan permukiman dan pelengkapannya di luar kawasan kumuh;
 - s. menyelenggarakan pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, saluran penggelontoran/saluran pembuangan dan penyelenggaraan infrastruktur jalan permukiman dan pelengkapannya di luar kawasan kumuh;
 - t. menyelenggarakan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan penyelenggaraan kerjasama, kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dan penyelenggaraan infrastruktur jalan permukiman dan pelengkapannya di luar kawasan kumuh;
 - u. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Infrastruktur Permukiman;
 - v. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - w. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - x. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - y. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - z. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - aa. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - bb. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 - cc. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - dd. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
 - ee. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman membawahkan:
- a. Seksi Sanitasi dan Air Limbah Domestik;
 - b. Seksi Pengelolaan Air Bersih; dan
 - c. Seksi Drainase dan Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman.

Pasal 29

- (1) Seksi Sanitasi dan Air Limbah Domestik dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sanitasi dan Air Limbah Domestik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sanitasi dan Air Limbah Domestik mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sanitasi dan Air Limbah Domestik;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sanitasi dan Air Limbah Domestik;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Sanitasi dan Air Limbah Domestik;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sanitasi dan Air Limbah Domestik.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Sanitasi dan Air Limbah Domestik adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sanitasi dan Air Limbah Domestik;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Sanitasi dan Air Limbah Domestik sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sanitasi dan Air Limbah Domestik berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penanganan Sanitasi dan Air Limbah Domestik berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan survai untuk pendukung pembangunan, peningkatan atau perbaikan atau pemeliharaan atau pengembangan sistem pengelolaan Sanitasi dan Air Limbah Domestik di luar kawasan kumuh;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis terhadap detail perencanaan pembangunan atau peningkatan atau perbaikan atau pemeliharaan atau pengembangan sistem pengelolaan sanitasi dan air limbah domestik di luar kawasan kumuh;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan program pembangunan atau peningkatan atau perbaikan atau pemeliharaan atau pengembangan sistem pengelolaan sanitasi dan air limbah domestik di luar kawasan kumuh;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan pembangunan atau peningkatan atau perbaikan atau pemeliharaan atau pengelolaan atau pengembangan sistem sanitasi dan air limbah domestik di luar kawasan kumuh;
 - i. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan penyelenggaraan kerjasama, kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan atau peningkatan atau perbaikan atau pemeliharaan atau pengelolaan atau pengembangan sistem pengelolaan sanitasi dan air limbah domestik di luar kawasan kumuh;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi Sanitasi dan Air Limbah Domestik;

- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- l. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- n. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- o. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- q. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- r. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- s. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- t. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

- (1) Seksi Pengelolaan Air Bersih dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pengelolaan Air Bersih.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan Air Bersih mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pengelolaan Air Bersih;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengelolaan Air Bersih;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pengelolaan Air Bersih;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pengelolaan Air Bersih.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Air Bersih adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pengelolaan Air Bersih;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pengelolaan Air Bersih sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pengelolaan Air Bersih berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembangunan jaringan perpipaan air bersih, perlindungan mata air, sumur bor dan sumur gali berdasarkan Norma, Standar, prosedur dan Kriteria (NSPK);
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan survey untuk pendukung pembangunan, peningkatan, perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan sistem penyediaan penanganan air bersih di luar kawasan kumuh;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis terhadap detail perencanaan pembangunan, peningkatan, perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan sistem penyediaan penanganan air bersih di luar kawasan kumuh;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan program pembangunan, peningkatan, perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan sistem penyediaan penanganan air bersih di luar kawasan kumuh;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, peningkatan, perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan sistem penyediaan penanganan air bersih di luar kawasan kumuh;
- i. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan penyelenggaraan kerjasama, kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan, peningkatan, perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan sistem penyediaan penanganan air bersih di luar kawasan kumuh;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi Pengelolaan Air Bersih;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- l. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- n. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- o. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- q. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- r. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- s. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- t. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

- (1) Seksi Drainase dan Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Drainase dan Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Drainase dan Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Drainase dan Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Drainase dan Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Drainase dan Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman;

- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Drainase dan Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Drainase dan Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Drainase dan Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Drainase dan Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Drainase dan Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten serta penyelenggaraan infrastruktur jalan permukiman berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan survai untuk pendukung pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dan penyelenggaraan infrastruktur jalan permukiman dan pelengkapannya di luar kawasan kumuh;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis terhadap detail perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dan penyelenggaraan infrastruktur jalan permukiman dan pelengkapannya di luar kawasan kumuh;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dan penyelenggaraan infrastruktur jalan permukiman dan pelengkapannya di luar kawasan kumuh;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, saluran penggelontoran/saluran pembuangan dan penyelenggaraan infrastruktur jalan permukiman dan pelengkapannya di luar kawasan kumuh;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan penyelenggaraan kerjasama, kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dan penyelenggaraan infrastruktur jalan permukiman dan pelengkapannya di luar kawasan kumuh;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Drainase dan Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - l. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - m. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - n. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - o. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - p. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - q. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;

- r. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- s. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- t. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 32

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Pengaturan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi unit pelaksana teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis Pemerintah Daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh sekretariat, bidang, unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional menurut lingkup tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan SKPD/instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas dalam menyelenggarakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada staf.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 36

- (1) Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 37

- (1) Sekretaris mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatannya.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat di lingkungan Dinas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
 - a. Peraturan Bupati Garut Nomor 232 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 232); dan
 - b. Peraturan Bupati Garut Nomor 233 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 233) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 30 - 12 - 2016
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 30 - 12 - 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2016 NOMOR 52